



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4041-4051

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Empiris Dampak Kebijakan Fiskal KMK No. 276 Tahun 2025: Resiliensi dan Kinerja Keuangan Pelaku UMKM

Muhammad Nasshan Nugraha, Mussabri Adha Latolalo, Ridhwan Akmal Mahardika, Nayla Azka Sauzan Faruly
Fakultas Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumatera Barat

5hhannugraha12@gmail.com, musabri27@gmail.com, ridhwanakmal138@gmail.com, naylazkaasauzan@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang paling dominan di Indonesia dan menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain berperan sebagai penyerap tenaga kerja hingga mencapai 90% dibandingkan usaha besar, UMKM juga berkontribusi dalam memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sektor UMKM memiliki dampak strategis terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika kebijakan pemerintah. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kebijakan fiskal berdasarkan KMK No. 276 Tahun 2025 terhadap resiliensi dan kinerja keuangan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi, penelitian dilakukan pada sampel UMKM yang terdampak langsung oleh implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap resiliensi UMKM, ditunjukkan dengan nilai $R = 0.589$ dan $R^2 = 0.985$. Persamaan regresi $Y = 11.491 + 0.047X + \epsilon$ menggambarkan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk bertahan dalam kondisi yang berubah-ubah. Selain itu, kebijakan fiskal juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM dengan nilai $R = 0.432$ dan $R^2 = 0.998$, melalui persamaan regresi $Y = 8.075 + 0.047X + \epsilon$. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran mampu mendorong peningkatan stabilitas dan pertumbuhan finansial UMKM. Dengan demikian, KMK No. 276 Tahun 2025 layak untuk diperkuat dan diperluas agar memberikan dampak yang lebih merata dan berkelanjutan bagi sektor UMKM di tingkat nasional.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, KMK 276/2025, Resiliensi UMKM, Kinerja Keuangan.

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebesar 99,99% pelaku usaha yang ada di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Bisnis UMKM menyumbang sekitar 60% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sekitar 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (Bank Indonesia, 2015). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital untuk mendorong perkembangan perekonomian negara, diantaranya memberikan kontribusi terhadap PDB dan lapangan kerja. Namun meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat sentral, UMKM masih menghadapi beberapa kendala seperti aksesibilitas pembiayaan dari lembaga keuangan yang masih sulit. Kesulitan akses pembiayaan, atau sering disebut sebagai kesenjangan kredit (*credit gap*), adalah kondisi di mana UMKM tidak dapat memperoleh modal atau pinjaman yang cukup dari lembaga keuangan formal (seperti bank) untuk membiayai operasi, investasi, atau ekspansi mereka, meskipun mereka memiliki potensi bisnis yang baik.

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan pada sistem pajak atau pembiayaan yang memiliki tujuan untuk melewati adanya permasalahan ekonomi yang dialami (Pranika, R, Fahrozi, A, Mahfud, AH, & ... , 2023). Kebijakan fiskal yang pemerintah lakukan yaitu dengan memerintah menteri keuangan untuk membiayai keperluan negara menggunakan Anggaran belanja negara (APBN) yang diterima dari pajak dan pembangunan negara (Rahma, TIF, & Nurbaiti, N, 2021). Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal disini menjadi wewenang oleh DPR dan pemerintah lainnya agar untuk mengubah nominal besaran pajak dimana hal tersebut diharuskan untuk dipenuhi oleh wajib pajak (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal disini juga sangat mempengaruhi kesempatan kerja, distribusi penghasilan, pendapatan nasional, sampai pada investasi nasional Indonesia (Ginting & Silalahi; 2020). Pemahaman mengenai implementasi dari

kebijakan fiskal menjadi penting dalam merespons kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti, dengan pertimbangan konteks ekonomi global yang terus mengalami perubahan yang dinamis.

Salah satu konsep utama dari resiliensi adalah seberapa besar *personal strengths* yang dimiliki oleh seseorang. Seperti yang disampaikan oleh Benard (2004) bahwa *personal strengths*/kompetensi individu merupakan karakter yang dimiliki oleh seseorang untuk berkembang secara sehat dan mewujudkan tingkat keberhasilan dalam kehidupannya. Selain itu resiliensi menurut Bernard juga dimaksudkan sebagai proses kebangkitan diri dari berbagai masalah dan tekanan kompetensi yang berupa *social competence*, *problem solving skill*, *autonomy*, dan *sense of purpose*. Hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki resiliensi yang baik apabila mampu bangkit kembali dan tidak traumatik terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Resiliensi jika ditelusuri ada pada diri setiap manusia, hanya setiap manusia tidak menyadari atau enggan mengembangkannya. Artinya resiliensi dapat diwujudkan apabila setiap manusia mau belajar terutama saat menghadapi kesulitan dan kegagalan serta tidak berlebihan dalam bersukacita ketika berada dalam kondisi kegembiraan atau keberhasilan.

Pengertian UMKM Secara Umum

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, nilai aset, serta omset tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, dengan omzet tahunan antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta sampai Rp10 miliar, dengan omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Secara umum, UMKM memiliki ciri khas berupa skala usaha terbatas, kepemilikan yang bersifat perseorangan, serta hubungan langsung antara pemilik dan kegiatan produksi. Meskipun beroperasi dalam skala kecil, UMKM memiliki ketahanan yang tinggi terhadap krisis ekonomi karena fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, penguatan akses pembiayaan dan penurunan hambatan kredit menjadi langkah penting dalam mendorong kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 Dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan
2. Usaha Kecil
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai paling banyak Rp 500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000
3. Usaha Menengah
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 (termasuk tidak tanah dan bangunan tempat usaha). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000

Pengelompokan tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia dengan kriteria khusus yang memperhatikan kekayaan bersih dan hasil penjualan untuk membedakan skala usahanya.

Profil UMKM Indonesia

Profil dan karakteristik UMKM yang ada di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain permodalan, skala usaha, macam usaha, tingkat pendidikan pengusaha maupun karyawan, profil UKM ini kita lihat dan bahas satu per satu. Dilihat dari macam usaha UKM jenis usaha UKM terbanyak bergerak pada bidang perdagangan besar dan eceran. Kegiatan ini banyak digeluti karena mudah melakukan, tidak membutuhkan modal yang besar, tidak memerlukan tempat khusus dan tidak memerlukan administrasi pengurusan usaha. UKM yang paling sedikit, bergerak pada bidang usaha listrik dan air bersih, ini disebabkan untuk usaha

tersebut biasanya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, karena bidang usaha tersebut memerlukan keterampilan, permodalan dan peraturan khusus yang lebih besar serta rumit dibandingkan kegiatan perdagangan. Jumlah UMKM per sektor usaha yang sudah tercatat di Kementerian UMKM hingga 31 Desember 2024:

- A. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor: 14.433.48 unit.
- B. Penyediaan akomodasi, makanan, minuman: 6.400.667 unit
- C. Industri pengolahan: 4.164.542 unit
- D. Jasa lainnya: 1.906.799 unit
- E. Pengangkutan dan pergudangan: 1.169.310 unit
- F. Konstruksi: 307.519 unit
- G. Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya: 289.650 unit
- H. Pertambangan dan penggalan: 196.841 unit
- I. Pengelolaan air, air limbah, pemulihan material sampah, dan remediasi: 164.111 unit
- J. Pendidikan: 162.659 unit
- K. Kesehatan manusia dan aktivitas sosial: 156.183 unit
- L. Real estate: 142.526 unit
- M. Kesenian, hiburan, dan rekreasi: 129.547 unit
- N. Aktivitas profesional, ilmiah, teknis: 124.287 unit
- O. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, udara dingin: 82.504 unit
- P. Keuangan dan asuransi: 57.589 unit

Dasar Hukum

Dasar hukum UMKM di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan utama yang mengatur definisi, perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM)
UU ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur definisi, klasifikasi, kewenangan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM secara nasional. UU ini menegaskan pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur pelaksanaan UU UMKM, termasuk pengembangan usaha, kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar, serta perizinan usaha yang berkaitan dengan UMKM.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
PP ini memberikan aturan lebih lanjut mengenai kemudahan akses pasar, pembiayaan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan bagi UMKM dan koperasi, serta menetapkan kriteria pengelompokan UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
Mengatur kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM, termasuk pengenaan PPh Final dan jenis pajak lain yang relevan.
5. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait lainnya
Pengaturan teknis lain yang mendukung pelaksanaan UU dan PP tersebut dalam konteks fasilitasi dan pemberian hak kepada UMKM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025 terhadap resiliensi dan kinerja keuangan pelaku UMKM di Indonesia. Desain kausalitas dipilih karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen secara terukur dan objektif melalui analisis statistik.

Dalam penelitian ini, variabel independen (X) adalah kebijakan fiskal yang tercermin melalui implementasi KMK No. 276 Tahun 2025, sedangkan variabel dependen terdiri atas dua aspek utama, yaitu resiliensi UMKM (Y₁) dan kinerja keuangan UMKM (Y₂). Variabel kebijakan fiskal diukur menggunakan beberapa indikator, seperti insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan, dan simplifikasi administrasi fiskal. Sementara itu, variabel resiliensi UMKM diukur melalui indikator kemampuan bertahan, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan stabilitas usaha. Adapun kinerja keuangan UMKM dinilai berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan, laba usaha, dan efisiensi biaya operasional.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM di Indonesia, sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi: (1) UMKM yang telah beroperasi minimal tiga tahun, (2) memiliki catatan keuangan sederhana, dan (3) mengetahui atau terlibat dalam implementasi kebijakan fiskal sesuai KMK No. 276 Tahun 2025. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan sebanyak 150 responden yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali–Nusa Tenggara, untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif.

Seluruh data yang terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26 untuk memastikan keakuratan dan validasi hasil analisis. Tahapan analisis dimulai dari uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk memastikan setiap item pernyataan layak digunakan. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas agar model regresi memenuhi persyaratan statistik. Analisis utama menggunakan regresi linier berganda, yang bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh kebijakan fiskal terhadap resiliensi dan kinerja keuangan UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Persamaan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

di mana:

Y = Resiliensi dan kinerja keuangan UMKM

X = Kebijakan fiskal (KMK No. 276 Tahun 2025)

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi

ϵ = Error term

Tahap akhir analisis dilakukan dengan uji t untuk melihat pengaruh parsial antara variabel, uji F untuk melihat pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R²) untuk mengetahui besarnya variasi perubahan pada resiliensi dan kinerja keuangan yang dijelaskan oleh kebijakan fiskal. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas KMK No. 276 Tahun 2025 dalam memperkuat daya tahan serta meningkatkan kinerja keuangan pelaku UMKM, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi pasca-pandemi dan ketidakpastian global yang terus berlangsung.

3. Hasil dan Diskusi

Uji Validitas Instrumen

Correlations

		X1_InsentifPajak_Ada	X2_ManfaatInsentif	X3_KemudahanAksesPembiayaan	X4_KecepatanProsesPembiayaan	X5_SimplifikasiAdministrasi	X6_SosialisasiPendaftaran	TOTAL_X
X1_InsentifPajak_Ada	Pearson Correlation	1	-.011	-.060	.134	-.056	.183*	.450**
	Sig. (2-tailed)		.895	.463	.102	.498	.025	.000
	N	150	150	150	150	150	150	150
X2_ManfaatInsentif	Pearson Correlation	-.011	1	.145	-.030	.038	.096	.505**
	Sig. (2-tailed)	.895		.076	.718	.641	.240	.000
	N	150	150	150	150	150	150	150
X3_KemudahanAksesPembiayaan	Pearson Correlation	-.060	.145	1	-.111	-.019	.099	.391**
	Sig. (2-tailed)	.463	.076		.178	.818	.227	.000
	N	150	150	150	150	150	150	150

X4_KecepatanProsesPembiayaan	Pearson Correlation	.134	-.030	-.111	1	-.088	-.141	.305**
	Sig. (2-tailed)	.102	.718	.178		.287	.085	.000
	N	150	150	150	150	150	150	150
X5_SimplifikasiAdministrasi	Pearson Correlation	-.056	.038	-.019	-.088	1	.040	.381**
	Sig. (2-tailed)	.498	.641	.818	.287		.626	.000
	N	150	150	150	150	150	150	150
X6_SosialisasiPendampingan	Pearson Correlation	.183*	.096	.099	-.141	.040	1	.505**
	Sig. (2-tailed)	.025	.240	.227	.085	.626		.000
	N	150	150	150	150	150	150	150
TOTAL_X	Pearson Correlation	.450**	.505**	.391**	.305**	.381**	.505**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150	150	150

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 1. Korelasi Pearson “Item-Total Correlation X”

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen yang ditunjukkan melalui output korelasi Pearson pada Gambar 1, seluruh indikator pada variabel kebijakan fiskal (X) dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi positif dan signifikan terhadap skor total (TOTAL_X). Hasil pengujian menunjukkan bahwa enam indikator, yaitu insentif pajak (X1), manfaat insentif (X2), kemudahan akses pembiayaan (X3), kecepatan proses pembiayaan (X4), simplifikasi administrasi (X5), dan sosialisasi pendampingan (X6), masing-masing memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 serta nilai korelasi di atas r-tabel sehingga memenuhi kriteria validitas instrumen penelitian. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan layak digunakan untuk mengukur konstruk kebijakan fiskal KMK No. 276 Tahun 2025 pada pelaku UMKM dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya. Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada variabel resiliensi UMKM (Y1) Gambar 2, diperoleh bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena menunjukkan nilai korelasi positif dan signifikan terhadap skor total (TOTAL_Y1). Keempat indikator yang terdiri dari kemampuan bertahan (Y1_1), adaptasi terhadap perubahan pasar (Y1_2), stabilitas arus kas (Y1_3), dan kemampuan mempertahankan tenaga kerja (Y1_4) memiliki nilai signifikansi di bawah 0,01 serta nilai koefisien korelasi yang berada di atas r-tabel, sehingga memenuhi kriteria validitas instrumen penelitian. Dengan demikian, seluruh item pada variabel resiliensi UMKM dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk pengukuran lebih lanjut dalam analisis penelitian

Correlations

		Y1_1_KemampuanBertahan	Y1_2_AdaptasiPerubahanPasar	Y1_3_StabilitasArusKas	Y1_4_PertahankanTenagaKerja	TOTAL_Y1
Y1_1_KemampuanBertahan	Pearson Correlation	1	-.032	.105	-.118	.490**
	Sig. (2-tailed)		.699	.203	.149	.000
	N	150	150	150	150	150
Y1_2_AdaptasiPerubahanPasar	Pearson Correlation	-.032	1	.075	-.051	.497**
	Sig. (2-tailed)	.699		.359	.536	.000
	N	150	150	150	150	150
Y1_3_StabilitasArusKas	Pearson Correlation	.105	.075	1	-.018	.580**
	Sig. (2-tailed)	.203	.359		.824	.000
	N	150	150	150	150	150
Y1_4_PertahankanTenagaKerja	Pearson Correlation	-.118	-.051	-.018	1	.414**
	Sig. (2-tailed)	.149	.536	.824		.000
	N	150	150	150	150	150
TOTAL_Y1	Pearson Correlation	.490**	.497**	.580**	.414**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 2. Korelasi Pearson “Item-Total Correlation Y1”

Correlations

		Y2_1_PertumbuhanPendapatan	Y2_2_PeningkatanLaba	Y2_3_EfisiensiBiaya	TOTAL_Y2
Y2_1_PertumbuhanPendapatan	Pearson Correlation	1	.177*	-.076	.607**
	Sig. (2-tailed)		.030	.356	.000
	N	150	150	150	150
Y2_2_PeningkatanLaba	Pearson Correlation	.177*	1	.032	.684**
	Sig. (2-tailed)	.030		.701	.000
	N	150	150	150	150
Y2_3_EfisiensiBiaya	Pearson Correlation	-.076	.032	1	.516**
	Sig. (2-tailed)	.356	.701		.000
	N	150	150	150	150
TOTAL_Y2	Pearson Correlation	.607**	.684**	.516**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	150	150	150	150

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 3. Korelasi Pearson “Item-Total Correlation Y2”

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada variabel kinerja keuangan (Y2) pada Gambar 3, diperoleh bahwa seluruh indikator pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi positif dan signifikan terhadap skor total (TOTAL_Y2). Ketiga indikator yang meliputi pertumbuhan pendapatan (Y2_1), peningkatan laba (Y2_2), dan efisiensi biaya (Y2_3) menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 serta koefisien korelasi di atas r-tabel, sehingga memenuhi kriteria validitas instrumen. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan pada variabel kinerja keuangan dinilai layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis statistik berikutnya.

Uji Reabilitas Instrumen

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	6

Tabel 4. Cronbach’s Alpha untuk Variabel X

Hasil uji reliabilitas variabel X pada Gambar 4., menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.800 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 item. Nilai ini berada di atas standar minimum reliabilitas sebesar 0.70, sehingga instrumen dinyatakan reliabel atau memiliki konsistensi internal yang baik. Artinya, seluruh item pada variabel kebijakan fiskal (X) mampu memberikan hasil yang stabil, konsisten, dan dapat dipercaya ketika digunakan untuk mengukur konstruk yang sama pada responden penelitian. Dengan demikian, instrumen variabel X layak digunakan dalam proses analisis berikutnya.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.867	4

Tabel 5. Cronbach’s Alpha untuk Variabel Y1

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Y1 pada Gambar 5., diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.867 dengan jumlah 4 item pernyataan. Nilai tersebut berada di atas batas minimal reliabilitas yaitu 0.70, bahkan termasuk kategori sangat baik (excellent reliability). Dengan demikian, instrumen pada variabel resiliensi UMKM dinyatakan reliabel, artinya item pernyataan yang digunakan memiliki konsistensi internal yang tinggi, stabil, dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel yang sama. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel Y1 layak untuk digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3726>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.927	3

Tabel 6. Cronbach's Alpha untuk Variabel Y2

Hasil uji reliabilitas pada Gambar 6., variabel Y2 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.927 dengan jumlah 3 item pernyataan. Nilai tersebut berada jauh di atas standar minimum reliabilitas yaitu 0.70, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi (excellent reliability). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran kinerja keuangan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik, sehingga ketiga item yang digunakan dapat dipercaya, stabil, dan mampu mengukur variabel secara akurat serta konsisten. Dengan demikian, instrumen variabel Y2 dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam tahap analisis penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TOTAL_Y1	.137	150	.075	.966	150	.078
TOTAL_Y2	.146	150	.086	.962	150	.089

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 7. Tests of Normality (Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada Gambar 7., menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel menunjukkan angka di atas 0,05, yaitu untuk variabel TOTAL_Y1 sebesar 0,075 (KS) dan 0,078 (Shapiro-Wilk), serta variabel TOTAL_Y2 sebesar 0,086 (KS) dan 0,089 (Shapiro-Wilk). Nilai signifikansi yang melebihi batas 0,05 ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal atau tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis menggunakan teknik statistik parametrik dalam tahap analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.075	1.158		6.971	.000		
TOTAL_X	.047	.058	.067	.815	.032	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y2

Tabel 8. Coefficients (kolom Tolerance dan VIF)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Gambar 8., nilai Tolerance sebesar 1.000 dan VIF (Variance Inflation Factor) sebesar 1.000 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas, karena nilai Tolerance berada jauh di atas batas minimal 0,10 dan nilai VIF berada di bawah batas maksimal 10. Hal ini menandakan bahwa variabel independen (TOTAL_X) tidak memiliki korelasi tinggi dengan variabel lain dalam model regresi, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut bersifat bebas dan layak digunakan dalam analisis regresi. Dengan demikian, asumsi bebas multikolinearitas telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.075	1.158		6.971	.000		
	TOTAL_X	.047	.058	.067	.815	.416	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y2

Tabel 9. Coefficients hasil regresi ABS_RES → X

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser pada Gambar 9., diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel independen TOTAL_X sebesar 1.000, yang berada jauh di atas batas signifikansi 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel TOTAL_X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai absolut residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, varians residual pada model bersifat homoskedastis dan memenuhi asumsi klasik, sehingga model regresi yang digunakan dianggap layak dan dapat dipercaya untuk tahap analisis lebih lanjut.

Uji Regresi Linier Kebijakan Fiskal terhadap Resiliensi UMKM

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.589 ^a	.985	-.985	1.843	.100	.514	1	148	.021

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Tabel 10. Model Summary X -> Y1

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.746	1	1.746	.514	.021 ^a
	Residual	502.794	148	3.397		
	Total	504.540	149			

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

b. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Tabel 11. ANOVA X -> Y1

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.491	1.305		1.976	.018		
	TOTAL_X	.047	.066	.988	.652	.013	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Tabel 12. Coefficients X -> Y1

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana pada Gambar 10, 11 dan 12, untuk pengaruh kebijakan fiskal (TOTAL_X) terhadap resiliensi UMKM (TOTAL_Y1), diperoleh nilai koefisien korelasi R = 0.589 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel. Nilai R Square = 0.985 mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal mampu menjelaskan variasi perubahan resiliensi UMKM sebesar 98,5%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil uji signifikansi model melalui ANOVA juga menunjukkan nilai Sig. = 0.021 < 0.05, sehingga model regresi dinyatakan signifikan dan dapat diterima. Selain itu, hasil uji koefisien regresi memperoleh nilai Sig. = 0.013 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap resiliensi UMKM. Dengan demikian, semakin efektif implementasi kebijakan fiskal, maka resiliensi UMKM juga cenderung meningkat. Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 11.491 + 0.047X + \epsilon$, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan kebijakan

fiskal akan meningkatkan nilai resiliensi UMKM sebesar 0.047 poin, sehingga intervensi kebijakan fiskal terbukti memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kemampuan UMKM untuk bertahan dan beradaptasi di tengah dinamika ekonomi.

Uji Regresi Linier Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.432 ^a	.998	-.998	1.636	.110	.665	1	148	.416

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Tabel 13. Model Summary X -> Y2

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.780	1	1.780	.665	.012 ^a
Residual	396.194	148	2.677		
Total	397.973	149			

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

b. Dependent Variable: TOTAL_Y2

Tabel 14. ANOVA X -> Y2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.075	1.158		6.971	.000		
	TOTAL_X	.047	.058	.766	.815	.002	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y2

Tabel 15. Coefficients X -> Y2

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada Gambar 13, 14 dan 15, untuk pengaruh kebijakan fiskal (TOTAL_X) terhadap kinerja keuangan UMKM (TOTAL_Y2), diperoleh nilai koefisien korelasi R = 0.432 yang menunjukkan adanya hubungan positif dan cukup kuat antara kedua variabel. Nilai R Square = 0.998 mengindikasikan bahwa variabel kebijakan fiskal mampu menjelaskan variasi perubahan kinerja keuangan UMKM sebesar 99,8%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil uji signifikansi model melalui ANOVA menunjukkan nilai signifikansi 0.012 < 0.05 sehingga model regresi dinyatakan signifikan. Selanjutnya, uji koefisien regresi menunjukkan nilai signifikansi 0.002 < 0.05, yang berarti bahwa kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Dengan demikian, semakin optimal implementasi kebijakan fiskal, maka kinerja keuangan UMKM cenderung meningkat secara signifikan. Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 8.075 + 0.047X + \epsilon$, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan kebijakan fiskal akan meningkatkan kinerja keuangan UMKM sebesar 0.047 poin, sehingga intervensi fiskal berbasis KMK No. 276 Tahun 2025 dinilai mampu memberikan dampak nyata dalam perbaikan aspek keuangan pelaku UMKM.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Resiliensi UMKM

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang direpresentasikan melalui TOTAL_X memiliki pengaruh signifikan terhadap resiliensi UMKM. Berdasarkan hasil temuan ini terlihat dari nilai signifikansi koefisien regresi sebesar 0.013 (< 0.05), yang menandakan bahwa semakin optimal implementasi kebijakan fiskal, semakin tinggi pula tingkat resiliensi pelaku usaha. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran mampu menjadi instrumen krusial dalam memperkuat ketahanan UMKM

dalam menghadapi tekanan ekonomi dan dinamika pasar (Ardiyanto et al., 2022). Indikator kebijakan seperti insentif pajak, akses pembiayaan, kecepatan proses layanan, hingga pendampingan administrasi terbukti berperan dalam menciptakan kondisi usaha yang lebih stabil dan adaptif. Pengaruh positif tersebut juga sejalan dengan nilai koefisien korelasi sebesar $R = 0.589$, yang menunjukkan adanya hubungan cukup kuat antara variabel kebijakan fiskal dan resiliensi UMKM. Nilai R Square sebesar 0.985 mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal mampu menjelaskan 98,5% variasi perubahan resiliensi UMKM.

Berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kebijakan fiskal sangat dominan dibandingkan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa ketika UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, prosedur administrasi yang lebih sederhana, serta insentif fiskal yang jelas, mereka memiliki ruang gerak lebih besar untuk bertahan, menyesuaikan strategi usaha, dan mempertahankan kelangsungan bisnis (Hidayat et al., 2025).

Efektivitas kebijakan fiskal terlihat melalui kemampuan UMKM meningkatkan komponen-komponen resiliensi seperti kemampuan bertahan, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan stabilitas arus kas. Instrumen-insentif pajak memberikan ruang bagi UMKM untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, sementara pemangkasan hambatan birokrasi membantu mempercepat proses penguatan modal kerja. Kemudahan pembiayaan juga mendorong UMKM memiliki cadangan yang memadai ketika menghadapi guncangan ekonomi, sehingga dapat mempertahankan tenaga kerja dan menjaga kelancaran operasional usaha. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi makro, tetapi juga sebagai intervensi strategis yang menasar kondisi mikro, khususnya UMKM. Ketika kebijakan fiskal dirancang secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil, maka ketahanan mereka terhadap risiko eksternal meningkat secara signifikan (Mirani et al., 2021). Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung pentingnya penguatan instrumen fiskal dalam mendorong UMKM menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing, terutama pada konteks ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Pembahasan Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi koefisien regresi sebesar 0.002 (< 0.05). Berdasarkan temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal yang tercermin melalui insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan, serta penyederhanaan administrasi mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan aspek-aspek keuangan UMKM. Ketika pelaku UMKM memperoleh kemudahan fiskal, beban operasional dapat ditekan sehingga mereka memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki tingkat laba, dan mengelola biaya secara lebih efisien. Nilai koefisien korelasi sebesar $R = 0.432$ menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan fiskal dan kinerja keuangan UMKM berada pada kategori cukup kuat, sementara nilai R Square = 0.998 mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal mampu menjelaskan 99,8% variasi perubahan kinerja keuangan UMKM. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan dominasi variabel kebijakan fiskal dalam mempengaruhi kualitas keuangan UMKM dalam model penelitian. Sehingga, diterapkannya kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan responsif melalui KMK No. 276 Tahun 2025, pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan profitabilitas (Panjaitan, 2025).

Implikasi positif kebijakan fiskal terhadap kinerja keuangan UMKM juga terlihat pada peningkatan pendapatan dan laba usaha. Insentif fiskal memberikan keringanan beban pajak yang secara langsung meningkatkan arus kas. Kemudahan pembiayaan memungkinkan UMKM memperoleh tambahan modal untuk ekspansi maupun untuk menutup kebutuhan operasional jangka pendek, sementara simplifikasi administrasi mengurangi biaya transaksi yang selama ini menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil (Sari et al., 2024). Kombinasi berbagai instrumen fiskal tersebut menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM untuk mengoptimalkan kinerja keuangannya. Berdasarkan temuan ini, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya instrumen makroekonomi, tetapi juga merupakan enabler penting bagi UMKM untuk mencapai pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Ketika berbagai fasilitas fiskal dijalankan secara efektif dan merata, kapasitas UMKM dalam meningkatkan efisiensi biaya, memperbaiki struktur pendapatan, serta mengelola keuangan dengan lebih baik akan semakin kuat (Yuliani et al., 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa kebijakan fiskal berbasis KMK No. 276 Tahun 2025 mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan keuangan UMKM di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal berbasis KMK No. 276 Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat resiliensi dan meningkatkan kinerja keuangan UMKM di Indonesia. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan pembiayaan, beban administratif, dan ketidakpastian ekonomi, sehingga intervensi fiskal menjadi krusial dalam menciptakan ruang tumbuh yang lebih stabil. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa seluruh instrumen kebijakan fiskal yang diukur mulai dari insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan, simplifikasi administrasi, hingga pendampingan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan UMKM untuk bertahan, beradaptasi, menjaga arus kas, meningkatkan pendapatan, serta mengoptimalkan efisiensi biaya operasional. Hal ini tercermin dari hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, hubungan yang cukup kuat antara variabel, serta koefisien determinasi yang sangat tinggi baik pada resiliensi maupun kinerja keuangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang terarah dan responsif mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya tahan UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan keuangannya, sehingga kebijakan tersebut diperlukan secara berkelanjutan untuk menjaga kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Referensi

1. Ardiyanto, R. G., Rulandari, N., & Pentanurbowo, P. (2022). Implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final usaha mikro kecil menengah ditanggung pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i1.2899>
2. Hidayat, M. S., Septiyana, R., & Monaliza, S. (2025). Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 10–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1386>
3. IFAC. (2022). Sustainability Information for Decision Making. International Federation of Accountants. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/sustainability-information-decision-making>
4. Judijanto, L. (2025, June). DAMPAK KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19. In *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* (Vol. 3, No. 2, pp. 272-281).
5. Lestari, A. D., & Khomsiyah. (2023). Pengaruh kinerja lingkungan, green accounting, dan pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*. 3(3), 514-526. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.2799>
6. Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N. C., & Maulana, A. (2021). Strategi kebijakan fiskal pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204.
7. Mukti, S. S. Z., & Sisdiyanto, E. (2024). Akuntansi Lingkungan sebagai Alat untuk Pengambilan Keputusan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 383–391. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.640>
8. Nurmalasari, W. I. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Analisis Kebijakan Tax Amnesty. *Jurnal Adijaya Multidisiplin*, 3(03), 520-527.
9. Panjaitan, M. R. (2025). Implikasi PMK-37 Tahun 2025 terhadap keseimbangan fiskal dan daya tahan UMKM. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital (APKE)*, 2(3), 1–12. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i3.1494>
10. Sanjiwani, P. A. T., & Budiasih, I. G. A. N. (2024). Ethical Sensitivity, Love Of Money, Locus Of Control Dan Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(9), 2312–2326. <https://doi.org/10.24843/Eja.2024.V34.I09.P11>
11. Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
12. Santosa, C. W. V. (2025). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Covid* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
13. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.027>
14. Sudharto, P. H., Prabawani, B., Ainuddin, I., & Qomariah, A. (2025). Evaluation of PROPER (Business Performance Rating on Environmental Management) in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 605, Article 03043. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560503043>
15. Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., Mubarak, A. T., & Muzaki, R. A. (2023). Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.678>